

TANTANGAN PEMINDAHAN DAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA: PERSPEKTIF PENDANAAN/PEMBIAYAAN

Ariesy Tri Mauleny, Dewi Wuryandani, Hilma Meilani, Izzaty

LATAR BELAKANG

Pembangunan IKN di Kaltim merupakan upaya pemerintah dan DPR RI yang tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) sebagai magnet pertumbuhan ekonomi baru sehingga mendukung pembangunan Indonesia sentris.

RUMUSAN MASALAH

- *Benchmarking* pembangunan dan pemindahan IKN di negara lain.
- Skema pendanaan/pembiayaan IKN dalam UU Nomor 3/2022.
- Dampak IKN pada kesinambungan fiskal dan upaya mewujudkan pusat ekonomi baru.
- Skema pendanaan/pembiayaan IKN termasuk pembiayaan internasional.

TANTANGAN:



ruang fiskal yang terbatas, saat ini 20-22% dari belanja negara (Rp444-488,4 triliun)



masih rendahnya ketersediaan belanja wajib (*mandatory spending*) dan rasio pajak



keterlibatan anggaran negara yang berlebihan akan mengganggu penganggaran sektor produktif



keterlibatan peran pemerintah yang terlalu jauh juga bisa menyebabkan *crowding out* terhadap peran swasta.

LESSON LEARNED

ASPEK			
Lokasi Ibu Kota Baru (km)	915	25	441,6
Total Biaya (% PDB)	2-3	10,17	Lama: 2,36 Baru: 1,23
Skema Pembiayaan	Tradisional	Public Private Partnership	Tradisional
Komitmen	Plano de Metas	Vision 2020	Tidak Ada
Keberhasilan			

Berdasarkan *lesson learned*, dapat dikatakan bahwa aspek penting dalam keberhasilan pemindahan ibu kota ini yaitu terdapat pada kemauan dan komitmen politik yang kuat dari pemerintah

POTENSI

- *Multiplier effect* dan pemerataan pembangunan.
- Stok utang menurun 30,9% PDB, defisit APBN menurun hingga 2%, dan beban bunga utang diperkirakan menurun 1,6% PDB (2022-2045).

Pendanaan dalam UU No. 3/2022

Dapat dimaksimalkan dengan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), melalui skema :

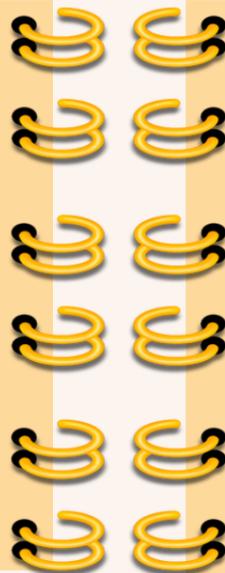
- sewa
- kerja sama pemanfaatan
- bangun guna serah/ bangun serah guna

Pendanaan termasuk pembiayaan internasional

Dapat bersumber dari lembaga pembiayaan bilateral/ multilateral melalui hibah dan/atau pemberian dana talangan.

KESIMPULAN

- Beban pemindahan dan pembangunan IKN diperkirakan 3.70-6,13% per tahun untuk infrastruktur utama dan strategis, masih cukup rasional dengan memanfaatkan ruang fiskal APBN.
- Sementara fungsi pendukung dan penunjang didominasi skema KPBU.
- Maka kesinambungan fiskal tetap terjaga baik rasio utang, defisit APBN maupun beban bunga utang yang diperkirakan terus menurun.



DPR RI dalam melaksanakan fungsinya

- Menganggarkan belanja negara pada tahap awal (2022-2024).
- Memperhatikan insentif fiskal dan non fiskal dalam proyek IKN.
- Konsistensi pengawasan proyek KPBU sesuai *timeline*.
- Membentuk panja pengawasan lintas komisi.
- Peningkatan *creative financing*.

REKOMENDASI

